



BPR KARTIKA MATUARI

# LAPORAN KEUANGAN PT BPR KARTIKA MATUARI TAHUN 2023



**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 079/BPR/KM/I/2024

KEPADA : OTORITAS JASA KEUANGAN  
DARI : **PT. BPR KARTIKA MATUARI**

<b>BANYAKN YA</b>	<b>ISI SURAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1 (Satu) Set Berkas	Bersama ini kami sampaikan sbb: - Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2023 - Penilaian Penerapan Tata Kelola tahun 2023	Dikirim dengan hormat sebagai laporan dan guna bahan seperlunya.

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KARTIKA MATUARI,**



**Noldy H. W. Korengkeng**

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Kartika Matuari**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666297-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601945-30012024054956

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprkartikamatuari@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-30 05:49:56



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl.Kompleks Gereja Petra No.190, Kel.Kinilow Satu, Kec.Tomohon Utara, Kota Tomohon

Nomor Telepon : 0431-353515

Penjelasan Umum : Penerapan Tata kelola sangat diperlukan agar perbankan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang ketat serta dapat menerapkan etika bisnis, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat dan transparan. Adapun Tata Kelola di Bank Perkreditan Rakyat harus menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola antara lain: Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran. Dalam membuat laporan Tata Kelola maka BPR Kartika Matuari berusaha membuat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Noldy H.W. Korengkeng	Direktur Utama	<p>1. Menentukan Kebijaksanaan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan; 2. Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional perusahaan; 3. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan; 4. Menyusun RBB setiap tahun; 5. Mengadakan perubahan2 dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha bank; 6. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenang; 7. Menyelenggarakan RUPS, bersama-sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 8. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku sebelumnya dalam RUPS Tahunan; 9. Menandatangani surat2 berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota dewan komisaris sesuai dengan aturan yang ada; 10. Menandatangani surat keputusan direksi secara sendiri atau bersama2 yang meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan pemberhentian karyawan; 11. Membina dan menjaga hubungan baik pihak eksternal baik termasuk BI, OJK, Kantor Pelayanan Pajak, LPS, PPATK dan yang lainnya agar tercipta kerjasama dan bimbingan dari instansi-instansi tersebut; 12. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya kepada bank; 13. Bertanggung jawab terhadap pencapaian RBB yang telah disetujui oleh dewan komisaris; 14. Menandatangani laporan- laporan bank yang penting khususnya laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak extern lainnya; 15. Mengendalikan dan mengawasi tugas-tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sumber daya manusia, pengawas dan pendanaan bank.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Titiek W. Sugeng	Direktur	1. Bertanggung jawab atas penyusunan garis-garis kebijaksanaan perusahaan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum dalam upaya membangkitkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan bank; 2. Memonitor dan mengevaluasi laporan pengendalian biaya, perubahan dan perkembangan pendapatan bank secara periodik dan berkesinambungan; 3. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan dan realisasinya pada setiap periode pertanggung jawaban anggaran; 4. Mewakili Direksi dalam hal Direktur Utama sedang berhalangan; 5. Mengkoordinasi dan mengarahkan semua kegiatan-kegiatan pada setiap bagian; 6. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja; 7. Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan bank; 8. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi laba perusahaan; 9. Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi; 10. Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk rapat-rapat Direksi dan Komisaris; 11. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya-biaya operasional; 12. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usul dari para Kepala Bidang unit kerja dan bagian personalia, setelah dipertimbangkan dengan Direktur Utama; 13. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan sampai ke unit terbawah; 14. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur Perusahaan.
3	Titiek W. Sugeng	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan & peraturan perundang2 yg berlaku; 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 8. Melaporkan kepada anggota Direksi Bank dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan 9. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur BPR; 10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; 11. Melakukan Hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Senantiasa melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris. al : - Direksi selalu berusaha memperhatikan tingkat kesehatan bank agar berada pada predikat Sehat; - Laporan-laporan berusaha dibuat sesuai dengan standar pelaporan yang diminta dan dilakukan pelaporan sesuai jangka waktu yang ditetapkan; - Direksi berusaha semaksimal mungkin untuk menekan NPL, walaupun ditahun 2023 NPL cukup tinggi mencapai 29,29%; - Demikian pula halnya dengan penjualan terutama Kredit yang diberikan, direksi berusaha untuk meningkatkan, tapi karena kondisi ekonomi dan faktor saingan yang semakin banyak sehingga di tahun 2023 penyaluran kredit terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya; - Dan direksi dalam operasionalnya terutama dalam pemberian kredit berusaha senantiasa melaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian; - Pemberian kredit khususnya kepada para pedagang dikota Bitung dan Manado yang bekerjasama dengan IKAPPI sudah dihentikan dan saat ini fokus pada penagihan.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ruslan Abdul Gani	Komisaris Utama	1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham; 2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan; 3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris; 4. Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat; 5. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari; 6. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 7. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas. 8. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi; 9. Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik.
2	Rudolf Dompas	Komisaris	1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank; 2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 3. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis; 4. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan; 5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; 6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan 7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait; 8. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham; 9. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja; 10. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

## Rekomendasi Kepada Direksi

Memberikan Rekomendasi kepada Direksi : - Senantiasa memperhatikan tingkat kesehatan bank; - Senantiasa memperhatikan kewajiban pelaporan kepada OJK dan pihak terkait lainnya; - Menekan NPL; - Meningkatkan penjualan terutama Kredit sebagai sumber penghasilan BPR; - Senantiasa dalam melaksanakan operasional bank terutama dalam pemberian kredit berdasarkan pada prinsip ke hati-hatian; - Harus lebih memperhatikan pemberian kredit kepada para pedagang di kota Bitung dan Manado, yang bekerjasama dengan IKAPPI masing-masing kota, karena tingkat NPL cukup tinggi.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik, terutama melaksanakan rapat komisaris minimal 1 kali setiap tiga bulan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Kartika Matuari belum membentuk komite-komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris, karena dalam POJK No.4/POJK.03/2015 disebutkan bahwa pembentukan komite hanya diwajibkan bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp.80.000.000,- (delapan puluh miliar).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Direksi tidak memiliki saham di BPR**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Noldy H.W. Korengkeng	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Titiek W. Sugeng	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Titiek W. Sugeng	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur juga melaksanakan/merangkap tugas sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan semua Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan pihak lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Noldy H.W. Korengkeng	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Titiek W. Sugeng	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Titiek W. Sugeng	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur juga melaksanakan/merangkap tugas sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan semua Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ruslan Abdul Gani	840.000.000	22,11
2	Rudolf Dompas	7.000.000	0,18

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua Komisaris memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ruslan Abdul Gani	tidak ada	tidak ada	Ruslan Abdul Gani - Indrawati Gani
2	Rudolf Dompas	tidak ada	tidak ada	Rudolf Dompas - Ybs

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua Komisaris memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ruslan Abdul Gani	tidak ada	tidak ada	Ruslan Abdul Gani (Ybs adalah Pemegang Saham, juga Suami dari Pemegang Saham Ibu.Indrawati Gani)
2	Rudolf Dompas	tidak ada	tidak ada	Rudolf Dompas (Ybs adalah Pemegang Saham)

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama Bp.Ruslan R.A.Gani adalah sebagai Pemegang Saham juga istrinya Indrawati Gani sebagai Pemegang Saham, dan Rudolf Dompas selain Komisaris juga sebagai Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	199980000	2	59505000
2	Tunjangan	2	58665000	2	5165000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		258645000		64670000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remunerasi Direksi dan Komisaris di tahun 2023 adalah Gaji, Tunjangan Jabatan, dan THR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja	-
4	Fasilitas lainnya	-	-

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lainnya adalah diikutsertakan Direksi sebagai peserta BPJS Kesehatan &amp; BPJS Tenaga Kerja

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,70	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,07	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,09	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,20	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,25	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	09-01-2023	2	- Pemeriksaan Fisik kas; - Membahas Tingkat Kesehatan bank; - Membahas pencapaian dan hasil pengawasan RBB 2022, Rencana RBB 2023; - Memastikan pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; - Pemenuhan laporan2 Kepada OJK dan pihak lain ; - Membahas issue-isue terkini- Mengingatkan Direksi dalam operasional- nya untuk selalu berdasarkan pada prinsip kehati-hatian; - Penambahan Modal dari Pemegang Saham yang baru dan mengingatkan untuk bisa memenuhi jumlah Modal Inti minimal Rp.6 Milyar sd akhir tahun 2024; - Lain-lain.
2	08-03-2023	2	- Pemeriksaan Fisik kas; - Membahas Tingkat Kesehatan bank; - Mempertegas fungsi pengawasan Dewan Komisaris; - Memastikan pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; - Manajemen resiko harus diperhatikan; - Membahas issue-isue terkini; - Lain-lain.
3	28-06-2023	2	- Pemeriksaan Fisik kas; - Membahas Tingkat Kesehatan bank; - Memastikan pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; - Pemenuhan laporan2 Kepada OJK dan pihak lain; - Membahas issue-isue terkini; - Lain-lain.
4	07-09-2023	2	- Pemeriksaan Fisik kas; - Membahas Tingkat Kesehatan bank; - Memastikan pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; - Pemenuhan laporan2 Kepada OJK dan pihak lain; - Membahas issue-isue terkini; - Lain-lain.
5	02-11-2023	2	- Pemeriksaan Fisik kas; - Membahas Tingkat Kesehatan bank; - Rencana Bisnis; - Memaksimalkan fungsi Internal Audit BPR; - Memastikan pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; - Pemenuhan laporan2 Kepada OJK dan pihak lain; - Membahas issue-isue terkini; - Mengingatkan Direksi senantiasa untuk melaksanakan APU/PPT, termasuk laporan Pengkinian Data Nasabah; - Pemenuhan action plan Modal Inti s/d akhir 2024; - Lain-lain.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ditahun 2023 BPR Kartika Matuari telah melaksanakan Rapat Komisaris sesuai ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ruslan Abdul Gani	5	0	100,00
2	Rudolf Dompas	5	0	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam setiap kesempatan Rapat Dewan Komisaris semua hadir.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dtahun 2023 tidak terjadi Fraud

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ditahun 2023 tidak ada masalah hukum yang dihadapi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik**

Nama BPR	: PT. BPR Kartika Matuari
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl.Kompleks Gereja Petra No.190, Kel.Kinilow Satu, Kec.Tomohon Utara, Kota Tomohon
Nomor Telepon	: (0431)-353515
Modal Inti BPR	: 3.088.246.190,00
Total Aset BPR	: 6.808.384.014,00
Bobot BPR	: A
Status Audit Ekstern	: Tidak Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola terhadap 11 faktor penilaian secara umum mendapatkan nilai Komposit 1,8 (dibulatkan 2) atau baik. Kedepan apabila terdapat kelemahan- kelemahan untuk segera diperbaiki untuk Tata Kelola yang lebih baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,55	0,18	1,23	0.246	Direksi akan melengkapi struktur yang ada terutama PE Audit internal, agar fungsi kontrol dapat berjalan dengan baik.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,40	0,10	1,06	0.159	Secara Keseluruhan pelaksanaan tugas komisaris telah berjalan dengan baik
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR Kartika Matuari belum membentuk komite-komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris, karena dalam POJK No.4/POJK.03/2015 disebutkan bahwa pembentukan komite hanya diwajibkan bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp.80.000.000,- (delapan puluh miliar).
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,50	0,80	0,20	3,50	0.350	Walaupun dalam pelaksanaan sampai saat ini belum memiliki transaksi benturan kepentingan, namun BPR wajib menyiapkan perangkat dalam bentuk SOP Benturan Kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	1,12	0,27	2,49	0.249	SOP tentang kepatuhan harus dibuat agar menjadi dasar dalam melaksanakan Tata Kelola yang baik.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,20	1,10	0,20	2,50	0.250	Secara keseluruhan sudah baik, sudah ditunjuk pegawai khusus yang menangani PE Audit Internal yang independen.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Saat ini BPR masih memiliki asset dibawah 10 Milyar sehingga belum memiliki kewajiban untuk menggunakan Audit Eksternal.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,97	0,10	1,57	0.157	Lebih giat lagi dalam mengembangkan budaya manajemen resiko
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	2,00	1,20	0,10	3,30	0.248	BPR membuat kebijakan manajemen resiko sebagai patokan dalam operasional perusahaan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Dalam pelaksanaannya BPR senantiasa membuat Rencana Bisnis BPR sebagai acuan target yang harus dicapai dan arah kebijakan yang harus diambil.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik, antara lain BPR sudah menggunakan Core Banking yang baik, sehingga dapat mendukung dalam pelaporan-pelaporan kepada pihak terkait secara tepat waktu.
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sudah sesuai
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Direksi tinggal kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama dengan lokasi kantor.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak merangkap
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak ada hubungan keluarga
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Semua direksi telah lulus FPT, telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangannya ditetapkan oleh RUPS.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas secara independen tanpa ada intervensi dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain yang akan mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	4	Direksi senantiasa menindak lanjuti semua temuan dari pihak2 yang berkepentingan, dan diusahakan tepat waktu.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi senantiasa menyediakan data yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Senantiasa dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi senantiasa berusaha untuk tidak menjalankan kebijakan yang akan menguntungkan diri pribadi, selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Senantiasa memberikan kesempatan pelatihan kepada bagian terkait jika ada kesempatan pelatihan/seminar perbankan, juga melaksanakan pelatihan intern untuk meningkatkan pengetahuan karyawan ttg keuangan perbankan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi senantiasa menjalankan/mengambil keputusan terutama dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki acuan tentang etika kerja dan waktu kerja dalam Peraturan Kepegawaian dan Peraturan Rapat yang tertuang dalam Anggaran Dasar.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap Tahun Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi senantiasa mensosialisasikan /mengkomunikasikan melalui rapat staf
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Tidak melaksanakan Rapat Direksi secara rutin, namun setiap masalah setiap hari langsung didiskusikan.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Kinerja BPR saat ini masih cukup baik.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	BPR telah melaksanakan pelaporan Tata Kelola sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sudah sesuai
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Sudah sesuai
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Sudah sesuai
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Semua Komisaris bertempat tinggal dipropinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki Tata tertib Kerja, termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Sudah sesuai
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Semua komisaris tidak ada hubungan keluarga dengan sesama komisaris dan direksi.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Sudah sesuai
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Senantiasa Komisaris melaksanakan pengawasan minimal 1 kali setiap Triwulan dan memberikan rekomendasi ataupun nasihat melalui Laporan Dewan Komisaris termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Senantiasa dilakukan, dan dibuat laporan per semester yang dilaporkan ke OJK.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak campur tangan terhadap pengambilan keputusan operasional, kecuali yang berhubungan dengan pemberian kredit kepada Pihak Terkait dan Restrukturisasi, atau lainnya sesuai ketentuan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Senantiasa memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti semua temuan dari pihak2 yang berkepentingan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Senantiasa melakukan Rapat Dekom/pemeriksaan secara rutin sesuai ketentuan.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan Keputusan senantiasa berdasarkan musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris senantiasa berusaha untuk tidak menjalankan kebijakan yang akan menguntungkan diri pribadi, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dilaksanakan sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Pengambilan Keputusan senantiasa berdasarkan musyawarah mufakat
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	-
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	-
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	5	BPR belum membuat Kebijakan tentang Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Belum ada transaksi benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Belum pernah terjadi
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;  dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Sudah dilaksanakan, terlihat dalam struktur organisasi.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami tugas dan tanggung jawabnya, dan memahami POJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	3	Telah ditunjuk PE Fungsi Kepatuhan, namun karena keterbatasan Tenaga Kerja, PE Fungsi Kepatuhan masih merangkap dan melaksanakan fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	4	Belum dilaksanakan sepenuhnya.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR sudah membuat uraian tugas tanggung jawab PE yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa memastikan BPR dalam memenuhi Peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang ada.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa berupaya mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Senantiasa mengingatkan apabila ada komitmen yang dibuat BPR yang harus ditindaklanjuti kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Belum dilaksanakan sepenuhnya
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Belum dilaksanakan sepenuhnya
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,12	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR senantiasa berusaha lebih baik.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	Belum dilaksanakan sepenuhnya.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Belum pernah terjadi
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki PE Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE Audit Internal sudah ditunjuk, telah memiliki memiliki Sistem dan Prosedur yang baku sebagai dasar pelaksanaan tugasnya.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Sudah diangkat PE Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional (yang berhubungan dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Dalam Struktur PE Audit Intern bertanggungjawan langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	5	Belum melaksanakan
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR telah membuat pedoman kerja Audit Intern

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	-
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Karena sudah diangkat PE Audit Internal, sehingga sudah mulai dilaksanakan dengan baik
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Mulai dilaksanakan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Mulai dilaksanakan dengan baik.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah melaksanakan ketentuan dengan formulir pelaporan sesuai POJK.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	-

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah melaksanakan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	0	-
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	0	-
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	-

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;  BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	Telah menunjuk PE Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki Kebijakan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR telah memiliki Kebijakan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemn risiko

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dekom menyetujui Kebijakan Manajemen Resiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Belum dilaksanakan sepenuhnya
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Belum dilaksanakan sepenuhnya
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Belum dilaksanakan sepenuhnya
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Belum dilaksanakan sepenuhnya
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	jika ada kesempatan Direksi memberikan kesempatan kepada karyawan untuk peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan kepada OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	tidak dilaporkan karena belum ada
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	4	Belum membuat kebijakan intern
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	4	Belum membuat kebijakan intern
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Walaupun BPR belum memiliki Kebijakan tertulis ttg BMPK namun dalam pelaksanaan senantiasa mengacu pada aturan-aturan yang ada tentang BMPK BPR.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Secara berkala setiap bulan membuat laporan BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Sudah dilaksanakan sesuai aturan
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis dibuat untuk 1 tahun kedepan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis didukung oleh seluruh Pemegang saham yang disahkan dalam RUPS.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Dilaksanakan sesuai aturan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Bisnis
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis disampaikan ke OJK sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR menggunakan core Banking untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Disusun sesuai ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Melaksanakan sesuai ketentuan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Melaksanakan sesuai ketentuan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Disajikan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dilaksanakan sesuai ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Dibuat dan dilaporkan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kartika Matuari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)						Penilaian Outcome (H)						Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor		
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)							Jumlah	Bobot
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5				10%
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	7	0	0	1	0	8	0	3	0	2	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	7	0	0	4	0	11	0	3	0	6	0	0	9	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						1,38	0,55						1,80	0,18	1,23	0,25
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	8	1	0	0	0	9	0	8	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	15,00%
Nilai Awal				8	2	0	0	0	10	0	8	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1,11	0,56						1,00	0,40						1,00	0,10	1,06	0,16
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	5	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									5,00	2,50						2,00	0,80						2,00	0,20	3,50	0,35
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	2	1	1	1	0	5	0	0	3	0	2	0	5	0	0	2	0	1	0	3	0	0	10,00%
Nilai Awal				2	2	3	4	0	11	0	0	6	0	8	0	14	0	0	4	0	4	0	8	0	0	0
Rata-rata									2,20	1,10						2,80	1,12						2,67	0,27	2,49	0,25
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	1	3	0	0	1	5	0	0	1	3	0	0	4	0	1	2	1	0	0	4	0	0	10,00%
Nilai Awal				1	6	0	0	5	12	0	0	2	9	0	0	11	0	1	4	3	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2,40	1,20						2,75	1,10						2,00	0,20	2,50	0,25
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	3	0	0	0	0	3	0	1	2	4	0	0	7	0	2	0	0	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				3	0	0	0	0	3	0	1	4	12	0	0	17	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						2,43	0,97						1,00	0,10	1,57	0,16
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	2	0	4	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									4,00	2,00						3,00	1,20						1,00	0,10	3,30	0,25
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7,50%
Nilai Awal				3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						1,00	0,40						1,00	0,10	1,00	0,08
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	10,00%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						1,00	0,40						1,00	0,10	1,00	0,10
<b>Nilai Komposit</b>																									<b>1,83</b>	
<b>Predikat Komposit</b>																									<b>#VALUE!</b>	

Tomohon, 27 Januari 2024  
PT.BPR KARTIKA MATUARI

  
  
**RUSLAN ABDUL GANI**      **NOLDY H.W.KORENGKENG**  
 Komisaris Utama                      Direktur Utama